

**TATA KELOLA PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS BANK
SAMPAHDI KOTA PADANG**

***BANK-BASED WASTE MANAGEMENT GOVERNANCE IN PADANG
CITY WASTE BANK-BASED WASTE MANAGEMENT IN PADANG
CITY***

Dhandy Handana¹, Dewi Anggraini², Didi Rahmadi³

Program Studi Ilmu Politik Universitas Andalas, Program Studi Ilmu Politik UM
Sumbar

dhandyhandana@yahoo.com ,dewianggraini@soc.unand.ac.id, didirahmadi@hotmail.com

ABSTRAK : Bank sampah adalah salah satu wadah yang dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang masyarakat alami. Bank sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R (Reuse, Reduce, Recycle) dalam pengelolaan sampah pada sumbernya di tingkat masyarakat dengan pola insentif ekonomi. Di Kota Padang Bank Sampah juga telah merubah pandangan masyarakat terhadap sampah. sampah yang awalnya dianggap hanya sebagai benda yang tidak berguna kini malah dikumpulkan oleh masyarakat untuk kemudian disetorkan kepada Bank Sampah yang berada dekat rumah mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata kelola pengelolaan sampah berbasis Bank Sampah dan peran 3 aktor tata kelola dalam pengelolaan Bank Sampah di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam menentukan informan penelitian, dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kearah yang positif, karena upaya- upaya yang dilakukan oleh pengelola Bank Sampah telah mampu merubah perilaku peduli lingkungan masyarakat dan juga 3 aktor tata kelola juga memberikan kontribusi dalam keberlangsungan program Bank Sampah di Kota Padang.

Kata kunci: Bank Sampah, Tata Kelola

ABSTRACT : *The waste bank is one of the containers that can solve the problem that society is experiencing. The waste bank is one of the strategies for implementing 3R (Reuse, Reduce, Recycle) in waste management at the source at the community level with a pattern of economic incentives. In Padang City, the Garbage Bank has also changed the public's view of waste. Garbage which was initially considered only as useless objects is now actually collected by the community and then deposited to the Waste Bank which is near their house. This study aims to find out how the waste management based on the Waste Bank and the role of the 3 governance actors in the management of the Waste Bank in the City of Padang. This study uses a qualitative method with the type of case study research. Data collection techniques used are interviews and documentation. In determining the research informants, using purposive sampling technique. The results of this study show a positive direction, because the efforts made by the Waste Bank management have been able to change the behavior of caring for the environment of the community and also 3 governance actors also contribute to the sustainability of the Waste Bank program in Padang City.*

Keywords: Waste Bank, Governance

A. PENDAHULUAN

Peran Bank Sampah menjadi penting dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. PP tersebut mengatur tentang kewajiban produsen untuk melakukan kegiatan 3R dengan cara menghasilkan produk yang menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam; yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin; menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan diguna ulang; dan/atau menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang dan diguna ulang. Aturan ini dipertegas dengan adanya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* Dan *Recycle* Melalui Bank Sampah. Aturan mengenai pembentukan Bank Sampah di Kota Padang sebenarnya terdapat dalam Perwako No. 24 tahun 2014 tentang Gerakan Padang Bersih – Padang Sehat. Akan tetapi dalam aturan tersebut hanya sebatas pelaksanaan tugas untuk pengembangan Bank Sampah yang ditugaskan kepada Bapedalda yang sekarang sudah menjadi Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil observasi peneliti ke kantor Dinas Lingkungan Hidup, salah satu staf yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa DLH hanya membantu sebatas mencari CSR saja, tidak ada bantuan dana dari DLH. Narasumber juga mengatakan bahwa Bank Sampah ini akan sulit dijalankan apabila terikat dengan langsung dengan instansi pemerintah, karena pemerintah sendiri tidak mempunyai anggaran khusus untuk program ini. Pada saat ini beberapa Bank Sampah yang terdapat di Kota Padang sudah mempunyai perusahaan tempat bernaung yang memberikan bantuan materi maupun non materi yang bisa dibilang lebih baik daripada yang bisa diberikan oleh pemerintah. Selain itu Bank Sampah ini juga murni sebenarnya inisiatif dari masyarakat sendiri.

Narasumber juga mengatakan bahwa apabila peraturan untuk mendirikan Bank Sampah dibuat, pengaruhnya tidaklah besar. Hal ini dikarenakan setelah beberapa kali sosialisasi di awal tahun 2020 ke masyarakat terlihat bahwa minat dan kesadaran masyarakat masih rendah untuk mengolah sampah menjadi barang bernilai ekonomis. Pada akhirnya Bank Sampah memang hanya untuk masyarakat yang cinta lingkungan.

Memang Bank Sampah sendiri muncul atas dasar kesadaran masyarakat dan bukan program wajib pemerintah. Namun pemerintah Kota Padang melalui Walikota Mahyeldi juga menghimbau agar setiap kelurahan mempunyai bank sampah. Tetapi fakta di lapangan hanya terdapat 30 dan yang aktif hanya 12 bank sampah saja. Itu berarti bank sampah di Kota Padang masih kekurangan 110 unit lagi, mengingat kelurahan di Kota Padang jumlahnya sebanyak 144 kelurahan. Ini tentu dapat menghambat capaian pengurangan sampah di pemukiman maupun di TPA yang merupakan target pemko Padang. Disini peneliti beranggapan bahwa lambatnya perkembangan Bank Sampah di kota Padang akibat kurangnya dukungan dari pemerintah kota.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu sebuah metodologi penelitian yang didalamnya mencakup pandangan-pandangan filsafat mengenai tata tertib penyelidikan dan realitas dari objek yang diteliti. Pada penelitian ini teknik yang digunakan adalah *purposive sampling* (sampel bertujuan) atau yang didasarkan kepada jawaban informan. Informan dikatakan sebagai orang yang mempunyai cukup banyak informasi atau mengetahui banyak tentang pokok penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tata Kelola Pengelolaan Sampah Berbasis Bank Sampah

Secara regulasi sudah cukup terstruktur dengan rapi tahap- tahap pengelolaan sampah yang dimuat dalam kebijakan- kebijakan yang sudah disebutkan diatas. Mulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah sampai kepada bagaimana akhirnya Bank Sampah dapat dimasukkan kedalam salah satu strategi pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat secara langsung pada tingkat daerah yang berwenang.

2. Peran Aktor Dalam Pengelolaan Bank Sampah

a. Negara / Pemerintah

Dari hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang belum sepenuhnya berperan dalam pelaksanaan program Bank Sampah. Itu dibuktikan dengan tidak adanya regulasi yang dibuat atau dengan bantuan dana yang diberikan untuk keberlangsungan program Bank Sampah itu sendiri. Sementara didalam Jakstrada Kota Padang Tahun 2018 terdapat satu poin yang menyatakan kalau disetiap satu kecamatan harus ada satu Bank Sampah Induk, dan itu juga seharusnya menjadi tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

Dari kasus Bank Sampah Unit Andalas sepakat para pegiatnya merasa kecewa dengan pemerintah terkait cara pendekatan yang pemerintah lakukan terhadap Bank Sampah Unit Andalas Sepakat ini. Mereka beranggapan bahwa pemerintah hanya menumpang nama di program yang mereka jalankan, dan hanya mendekat ketika ada perlunya saja.

b. Peranan Swasta / Stakeholders

Dalam halnya tata kelola selain pemerintah dan masyarakat yang tak kalah mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan suatu program/ organisasi adalah pihak swasta. Untuk Bank sampah di Kota Padang saat ini sudah menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan seperti Pegadaian, Bank Nagari, Bank BRI dan lain sebagainya.

c. Masyarakat Sipil

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip tata kelola yang mempengaruhi jalannya sebuah organisasi. Keterlibatan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pasal 28, masyarakat dapat berperan dalam proses pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Dimana peran tersebut dapat dilakukan dengan cara, pemberi usul, saran dan pertimbangan kepada pemerintah.

Temuan ini menunjukkan bahwa memang masyarakat kita tidak bisa dipaksakan untuk membuat Bank Sampah, pada akhirnya Bank Sampah ini hanya untuk orang yang cinta lingkungan saja. Sama halnya dengan Bank Sampah Pancadaya, terbentuknya Bank Sampah ini juga atas inisiatif masyarakat sekitar.

Tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat sekitar bisadibilang tinggi dalam menjaga lingkungan. Dan sama dengan Bank Sampah pertama di Kota Padang, Bank Sampah Pancadaya juga berdiri atas inisiatif perseorangan juga.

Jadi terbentuknya Bank Sampah di Kota Padang memang karna inisiatif masyarakat sendiri, masyarakat yang cinta lingkungan. Atas dasar kesadaran itulah beberapa Bank Sampah masih eksis sekarang ini. Ditambah lagi dengan program- program unggulan yang dilakukan

oleh Bank Sampah tersebut juga menjadi sumber pendapatan untuk keberlangsungan Bank Sampah itu sendiri.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Tata Kelola Pengelolaan Sampah Berbasis Bank Sampah Di Kota Padang, maka peneliti berkesimpulan sebagai berikut:

1. Negara/ Pemerintah

Untuk bantuan pemerintah sendiri berbeda terhadap apa yang di dapatkan oleh dua Bank Sampah yang jadi objek penelitian. Bank Sampah Pancadaya mendapatkan lahan untuk mendirikan bangunan Bank Sampah tersebut yang mana bantuan tersebut didapat dari Kecamatan Kuranji, sedangkan Bank Sampah Unit Andalas Sepakat tidak mendapatkan bantuandari pemerintah.

2. Swasta/ Stakeholders

Dalam keberlangsungan jalannya program Bank Sampah pihak swasta juga adalah hal yang tidak kalah penting. Dalam perusahaan ada semacam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah lingkungan. Bank Sampah sebagai salah satu media dalam pengendalian kebersihan lingkungan mendapat keuntungan dari CSR ini. Keuntungan tersebut berupa kerjasama dengan pihak perusahaan dimana terdapat bantuan yang bisa digunakan untuk jalannya program Bank Sampah. Dari dua objek penelitian masing- masing menjalin kerja sama dengan perusahaan berbeda. Untuk Bank Sampah Pancadaya bekerja sama dengan Pegadaian dan untuk Bank Sampah Unit Andalas Sepakat bekerja sama dengan Bank Nagari.

3. Masyarakat Sipil

Dari hasil penelitian yang didapat adalah kesadaran masyarakat dalam menjalankan Bank Sampah cukup tinggi, setidaknya itu yang terjadi di dua Bank Sampah yang peneliti jadikan objek penelitian. Kedua Bank Sampah ini muncul semata- mata atas inisiatif masyarakat sendiri. Juga setelah berdiri pun masyarakat sekitar juga bergerak untuk mengumpulkan sampahlalu membawanya ke Bank Sampah.

E. DAFTAR PUSTAKA

Afifuddin.dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Pustaka Setia.2009
Afrizal.*Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya mendukung
Penggunaan*

Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: Rajawali Pers. 2015 Hal.102

Anih Sri Suryani, Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang), Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta. 2014 hlm. 74-75

Aunu Rofiq Djaelani, Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif,Fptk Ikip Veteran Semarang, Majalah Ilmiah Pawiyatan 82. 2013, Hal. 84

Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005, Hal.40

Faiz Zamzani, Ihda Arifin Faiz, dkk, *Audit Internal Konsep dan Praktik Sesuai dengan Standart for The Professional Practice Of Internal Auditing*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), Hlm.85

https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2012/07/120710_trashbank diakses ada 22 desember Pukul 22.00

<https://www.metrotvnews.com/play/NLMCRj1e-bank-sampah-gemah-ripah-bank-sampah-pertama-di-indonesia> diakses pada 18 Desember 2020 Pukul 15.20

Istiana Maftuchah, Muliaman D Hadad, *Sustainable Financing Industri Jasa Keuangan dalam Pembiayaan Berkelanjutan*, (Jakarta: Gramedia, 2015), Hlm.282.

Juanda Nawawi, *Membangun Kepercayaan dalam Mewujudkan Good Governnace*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 1. Nomor 3. Tahun 2012. Hlm 29. Diakses Tanggal 5 Juli 2019. Situs www.jurnal.unhas.ac.id KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), menlhk.go.id

Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000. Hlm 178

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Gerakan Padang Bersih-Padang Sehat

Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Program Pascasarjana* 2017. Hal.18

Putra Astomo. *Penerapan Prinsip- Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Hlm 412-415, Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Nomor 64 Tahun 2014. Diakses Tanggal 29 April 2021, www.jurnal.unsyiah.ac.id

Safuruddin. 2009. *Pilkada dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi tentang Partisipasi Politik Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilihnya pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005)*. Padang: Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Sanapiah Faisal. 1990. *Peenelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang, Hal. 39

Santrio Kamaluddin, "Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang". *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, hal 222

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, hal 218

Sukarman Kamuli, Evaluasi Kemajuan Penerapan Penyelenggaraan Good Governance Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal INOVASI*, Volume 5, Nomor 3, (2008)